

Contact: H.M. Julie Fortin
UN Swissindo World Media Office
Email: president.worldmedia@swissindo.news
Fax: 1-847-526-3681



MEDIA RILIS

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

UN SWISSINDO PEMILIK KELOMPOK BANK DUNIA DISELIDIKI KARENA TUDUHAN PALSU!

INDONESIA, 8 Agustus 2018 – Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengajukan tuduhan palsu dugaan penipuan dan pencemaran nama baik yang mengarah pada penyelidikan terhadap Mr. Sino AS Sugihartonegoro (Royal K.681 M1), UN SWISSINDO OWNER KELOMPOK BANK DUNIA atau WORLD BANK GROUP (WBG), berikut pengungkapannya dan laporan yang luas mengenai pemerintah dan korupsi politik didalam Bank Dunia, lebih dari 70 triliun USD dana hibah dan dana perwalian perantara sejak 1961, yang telah berada dibawah manajemen WBG, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA) dihadapan para pelaku atau aktor jasa keuangan EDS dan Financial Intermediary Funds (FIF).

Penyelidikan Sino AS Sugihartonegoro di markas Caraka-Cirebon tidak benar, sebenarnya klarifikasi kebenaran atas dokumen UN SWISSINDO yang dilaporkan oleh BI dan OJK telah diberikan. Atas adanya orang yang menganggap SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai dokumen palsu, sementara pemilik sertifikat dan nama-nama yang telah menandatangani SBI sendiri tidak pernah mengklaim dan tidak merasa tidak dihormati dengan cara apapun. Ini adalah fakta yang jelas, jika ada unsur kriminalitas, merekalah orang-orang yang seharusnya melaporkan dugaan penipuan dan pencemaran nama baik itu.

Klarifikasi sedang berlangsung dan kebenaran akan diuji oleh Mabes Polri. Semua korespondensi sekarang sampai diklimax.

Surat terakhir dari Royal K.681 M1, Ketua UN SWISSINDO, yang berisi mengenai Deklarasi Transaksi, Pemberitahuan dan Validasi, UNS-RI World Bank Group & TF2018 kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan Menteri Keuangan, Dr. Sri Mulyani telah disampaikan dan telah tiba di Meja kepala staff khusus Presiden, Jenderal Moeldoko pada tanggal 12 Juni 2018.

Pemerintah Indonesia, sebagai negara peminjam di Word Bank Group (WBG), serta Bank Indonesia dan 6 Prime Bank, tidak menyadari adanya hibah WBG-IDA yang saat ini berada dibawah kendali UN SWISSINDO WBG, yang menjadi bagian dari surat Pemberitahuan dan Validasi UNS-RI WORLD BANK GROUP & TF2018 tersebut, akan diumumkan pada acara TREATY EVENT di Tapak Siring Istana Bali 2018, sesuai dengan acara World Bank -IMF 2018.

Tujuan dari IBRD adalah untuk meminjamkan dana kepada pemerintah atau negara-negara yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan menengah. IDA memberikan pinjaman bebas bunga — disebut kredit — dan hibah kepada pemerintah atau negara-negara miskin. Bersama-sama, IBRD dan IDA membentuk Word Bank.

Melalui jaminan kualitas control yang disebut dengan Quality Assurance/Quality Control (QA/QC), Sistem Manual Kelompok Bank Dunia (WBG) adalah pelindung terbaik untuk teknologi, peraturan dan perubahan nama perusahaan, untuk melindungi PEMILIK yang sebenarnya dari konspirasi kejahatan perbankan diseluruh dunia, seperti yang dilaporkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) kode A.1.1.A, sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau HDI). IPM adalah data statistic gabungan dari indicator mengenai harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, yang digunakan untuk menentukan tingkatan peringkat negara-negara menjadi empat tingkatan berdasarkan perkembangan manusia. UN menggunakan data ini untuk menentukan tingkat bantuan yang akan

diberikan kepada Negara yang mungkin membutuhkan bantuan, yang didasarkan pada isu-isu kunci pembangunan manusia, ketidaksetaraan, kesenjangan gender dan kemiskinan.

Berdasarkan Review dari buku besar ID-IDA 1961-2018, yang mengungkapkan secara signifikan penyalahgunaan dana oleh pemerintah, khususnya di Indonesia, WBG telah memutuskan dan menetapkan Pemberitahuan dan Validasi dari INVOICE 1999 yang berada dalam kekuasaan UN Swissindo yang berkaitan dengan rekening 6 Prime Bank termasuk rekening; BCA, BRI, BNI, DANAMON, MANDIRI, BANK LIPPO (CIMB-NIAGA) ID-IDA 1999-2033 terkait dengan Pencairan Terbaru dan Terkini.

Data laporan dari tim penyidik (Investigator) dunia telah disampaikan kepada Royal K.681 M1, pemilik Bank Dunia, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen MENKOPOLHUKAM, yang berhubungan dengan beberapa Jenderal dan mantan Presiden Indonesia, mengenai mata uang kertas Polymer IDR 1999, untuk menunjukkan tanggung jawab mereka atas penyelesaian masalah dan jaminan mata uang kertas yang dicetak dalam denominasi 500.000, setara dengan 1 Gram emas, sebagai penyeimbang untuk pemeriksaan (investigasi) berskala besar, masalah pencurian yang sangat besar dari Indonesia, terutama khususnya Papua, sejak 1961.

WBG, WORLD BANK-UNDB telah memutuskan bahwa FIF dan EDS, sebagai mediator untuk pencairan dari Dana Perwalian Perantara bagi Indonesia IDA 1961-2018, telah sangat merugikan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia, dimana hanya dalam era Presiden Soeharto, dana hibah ID-IDA tidak pernah dipergunakan, dan mengakibatkan insiden perpecahan dan terpisahnya Timor Timur, PAPUA MERDEKA dan ACEH, adalah daerah dibawah kendali EDS, dan negara india yang termasuk dalam kategori IPM Negara miskin peringkat ke 1 sebagai Negara penerima dana hibah dan pada kenyataannya belum pernah menerima hibah ID-IDA.

Untuk periode 2005-2015, WBG, atas nama Indonesia (sebagai Negara Peminjam), mendukung semua kegiatan yang positif dari WBG UN-SWISSINDO di Indonesia, karena IBRD tidak bertanggung jawab atas dana IDA.

Melalui gerakan dari Allah SWT, Dinamika Perubahan Ekonomi Pancasila di Sistem Administrasi Negara akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan sumpah jabatan, demi pemulihan ekonomi untuk masyarakat Indonesia.

Sertifikat Pembebasan Beban Utang (SPBU) adalah tahap pertama dalam program UN-SWISSINDO Payment Order 1-11 (P1-11), untuk memberikan dan memastikan kesejahteraan setiap umat, keadilan sosial yang setara dan kedaulatan yang sesuai dengan isi Surat Ketetapan Bersama Mahkamah Agung yang diumumkan secara terbuka kepada publik oleh Royal K.681 M1 di Aklamasi Akbar pada tanggal 16 Oktober 2016, di Taman Pandang, di depan Istana Negara Jakarta. Tahap kedua dari program P1-11 adalah Voucher M1, sekarang sudah berjalan, untuk memberikan jaminan biaya hidup bagi seluruh umat manusia, dimulai dengan Indonesia. SPBU dan Voucher M1 adalah Sertifikasi yang Dapat Diterima, diakui oleh Mahkamah Agung Indonesia dan Non Litigasi/Pengadilan SPRIN NO. UN-81704/009 M1.

UN Swissindo akan terus bekerja dengan pemerintah Indonesia dan dunia, pantang mundur, sampai program P1-11 selesai, membawa kebebasan dan memuliakan semua makhluk murni di bumi, dimulai dengan menerima jaminan biaya hidup bulanan untuk sepanjang hayat, sebagai langkah maju dalam menikmati Surga di Bumi.

Untuk surat Deklarasi Transaksi yang lengkap, kunjungi "UN Swissindo WBG Indonesia: agenda perjanjian hibah program P1-11 Deklarasi Transaksi" info tentang sejarah UN Swissindo kunjungi swissindo.net, dan info tambahan, termasuk untuk men-download VOUCHER M1 anda yang GRATIS (jaminan biaya hidup untuk sepanjang hayat), kunjungi situs web swissindo.news

Translator : H.E. Agustin Bagu, H.E. Djoni Van Gobel & H.E. Yanan Piyohu

Editing : H.M. Ani Forest & H.E. Kartika Maidiana